



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 4 /IN/M/2022
TENTANG
STRATEGI PENCEGAHAN RISIKO PENYIMPANGAN
DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022-2024**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menyusun strategi pencegahan risiko penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2022 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 - 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1927);
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1875/KPTS/M/2022 tentang Pembentukan Komite Audit Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MENGINSTRUKSIKAN:

- KEPADA : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Jenderal Bina Marga;
5. Direktur Jenderal Cipta Karya;
6. Direktur Jenderal Perumahan;
7. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
8. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
11. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- UNTUK KESATU : Melaksanakan 9 (sembilan) Langkah Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 – 2024, yang terdiri atas:
1. Penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
2. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Budaya Anti Korupsi;
3. Pemanjapan Keandalan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri;
4. Peningkatan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi;
5. Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Proyek Strategis Nasional;
6. Implementasi Budaya Sadar Risiko;
7. Penguatan Unit Kepatuhan Intern;
8. Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
9. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penerapan *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CA-CM).
- KEDUA : Menyampaikan bukti dukung atas implementasi 9 (sembilan) Langkah Strategi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam sistem aplikasi yang disiapkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya Triwulan pelaporan, untuk selanjutnya dilakukan reuiu oleh Komite Audit.

- KETIGA : Melaporkan hasil reuiu Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Menteri setiap Triwulan pelaporan.
- KEEMPAT : Agar melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan:

1. Para Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



LAMPIRAN
INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 4/IN/M/2022
TENTANG
STRATEGI PENCEGAHAN RISIKO
PENYIMPANGAN DALAM PROSES
PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TAHUN 2022-2024

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Strategi 1 : Penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
- B. Strategi 2 : Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Anti Korupsi
- C. Strategi 3 : Pemantapan Keandalan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- D. Strategi 4 : Peningkatan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi
- E. Strategi 5 : Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)
- F. Strategi 6 : Implementasi Budaya Sadar Risiko
- G. Strategi 7 : Penguatan Unit Kepatuhan Intern (UKI)
- H. Strategi 8 : Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- I. Strategi 9 : Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penerapan *Continuous Audit & Continuous Monitoring* (CACM)

A. STRATEGI 1: PENGUATAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B12 (Desember 2022)			B15 (Maret 2023)			B18 (Juni 2023)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
1	Penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ)	1 Peningkatan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa (PKP-BJ) melalui penerapan Model Kematangan UKPBJ	1 Penerapan Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif untuk menuju PKP-BJ Proaktif	1.a Tersusunnya Rancangan/ Konsep Perubahan Peraturan Menteri PUPR No 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR (Bukti Dukung <i>Level Proaktif</i> pada <i>Domain</i> Manajemen Kelembagaan)	Rancangan/ Konsep Perubahan Peraturan Menteri PUPR No 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.a Terlaksananya Pengesahan atas Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PUPR No 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR	Perubahan Peraturan Menteri PUPR No 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.a Tersusunnya Surat Usulan Penilaian Lapangan terhadap penerapan Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif	Surat Usulan Penilaian Lapangan terhadap penerapan Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
				1.b Tersusunnya Rencana Kerja capaian tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) TA 2023	Dokumen rencana kerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.b.1 Terselenggaranya Rapat Koordinasi capaian tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) TA 2023 dengan Unit Kerja Terkait	Notulensi Rapat	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi			
							1.b.2 Terselenggaranya monitoring dan evaluasi atas capaian tingkat kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi			
				2.a Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pengumpulan Data pada Tahun Anggaran 2022	Laporan Evaluasi	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2.a Tersusunnya Rencana Strategis (<i>Strategic Plan</i>) dan Proses Bisnis Pengembangan Aplikasi SIPBJ	Dokumen <i>Strategic Plan</i> dan Proses Bisnis Pengembangan Aplikasi SIPBJ	1. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 3. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 5. Direktorat Kepatuhan Intern Unit Organisasi Teknis 6. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal			
	2 Peningkatan Kualitas PBJ Melalui Pengembangan dan Penerapan SIPBJ	2 Integrasi Aplikasi SIPBJ dengan Aplikasi pendukung PBJ lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan Sistem Satu Data	2.a	Laporan Dokumentasi Integrasi Aplikasi SIPBJ Tahap 1	1. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 3. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 5. Direktorat Kepatuhan Intern Unit Organisasi Teknis							

A. STRATEGI 1: PENGUATAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B21 (September 2023)			B24 (Desember 2023)			B27 (Maret 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
1	Penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ)	1 Peningkatan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa (PKP-BJ) melalui penerapan Model Kematangan UKPBJ	1 Penerapan Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif untuk menuju PKP-BJ Proaktif	1.a Terselenggaranya Penilaian Lapangan secara mandiri terhadap penerapan Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif	Laporan Penilaian Lapangan terhadap penerapan Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.a Tersusunnya Surat Permohonan Penetapan PKP-BJ	Surat Permohonan Penetapan PKP-BJ	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.a Terselenggaranya FGD Pendampingan Peningkatan Kemampuan UKPBJ menjadi PKP-BJ Proaktif	Laporan FGD Pendampingan Peningkatan Kemampuan UKPBJ menjadi PKP-BJ Proaktif	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
							1.b Tersusunnya Rencana Kerja capaian tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) TA 2024	Dokumen rencana kerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi			
		2 Peningkatan Kualitas PBJ Melalui Pengembangan dan Penerapan SIPBJ	2 Integrasi Aplikasi SIPBJ dengan Aplikasi pendukung PBJ lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan Sistem Satu Data	2.a Terlaksananya <i>Workshop</i> dan Uji Coba Integrasi Aplikasi SIPBJ Tahap I kepada Unor dan User Pengguna	Laporan <i>Workshop</i> Uji Coba	1. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 3. Direktorat Kepatuhan Intern Unit Organisasi Teknis 4. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Unit Organisasi 5. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 6. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah	2.a Terlaksananya Pengisian Data Aplikasi SIPBJ	Laporan Pelaksanaan Pengisian Data Aplikasi SIPBJ	1. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 3. Direktorat Kepatuhan Intern Unit Organisasi Teknis 4. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Unit Organisasi 5. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 6. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah	2.a Terlaksananya Implementasi Tahap 2 Integrasi Aplikasi SIPBJ dengan Aplikasi Pendukung PBJ (E-mon, EHRM, dan SPSE)	Laporan Dokumentasi Integrasi Aplikasi SIPBJ Tahap 2	1. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 3. Direktorat Kepatuhan Intern Unit Organisasi Teknis 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 5. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal 6. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, , Sekretariat Jenderal 7. Unit Organisasi atau Unit Kerja Pemilik Aplikasi

A. STRATEGI 1: PENGUATAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B30 (Juni 2024)			B33 (September 2024)			B36 (Desember 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
1	Penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ)	1 Peningkatan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa (PKP-BJ) melalui penerapan Model Kematangan UKPBJ	1 Penerapan Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif untuk menuju PKP-BJ Proaktif	1.a Terselenggaranya monitoring progres capaian tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) Level PKP-BJ Proaktif	Laporan monitoring progres capaian tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) Level PKP-BJ Proaktif	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.a Terselenggaranya Konsolidasi Penilaian Mandiri Capaian Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) TA 2024	Laporan pelaksanaan konsolidasi penilaian Mandiri	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.a Tersusunnya Rencana Kerja capaian tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) TA 2025	Dokumen rencana kerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
		2 Peningkatan Kualitas PBJ Melalui Pengembangan dan Penerapan SIPBJ	2 Integrasi Aplikasi SIPBJ dengan Aplikasi pendukung PBJ lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan Sistem Satu Data	2.a Terlaksananya <i>Workshop</i> dan Uji Coba Integrasi Aplikasi SIPBJ Tahap II kepada Unor dan <i>User</i> Pengguna	Laporan <i>Workshop</i> Uji Coba	1. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 3. Direktorat Kepatuhan Intern Unit Organisasi Teknis 4. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Unit Organisasi 5. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 6. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah	2.a Terlaksananya Pengisian Data Aplikasi SIPBJ	Laporan Pelaksanaan Pengisian Data Aplikasi SIPBJ	1. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 3. Direktorat Kepatuhan Intern Unit Organisasi Teknis 4. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Unit Organisasi 5. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 6. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah	2.a Terlaksananya <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi integrasi aplikasi SIPBJ dan Pengisian Data Aplikasi SIPBJ TA 2023	Laporan Evaluasi	1. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 3. Direktorat Kepatuhan Intern Unit Organisasi Teknis 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 5. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal

B. STRATEGI 2 : Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B12 (Desember 2022)			B15 (Maret 2023)			B18 (Juni 2023)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
2	Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Anti Korupsi	1 Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Antikorupsi	1 Penguatan Pengembangan Kompetensi SDM Antikorupsi	1.a Terbentuknya Tim <i>Review</i> Modul Anti Korupsi	SK Tim <i>Review</i> Modul Anti Korupsi	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.a Terlaksananya <i>review</i> Modul Anti Korupsi yang sudah ada	Hasil <i>Review</i> Modul	1. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.a Tersusunnya Draf Modul Anti Korupsi	Draf Modul Anti Korupsi	1. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal
				1.b Terlaksananya identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi bidang anti korupsi	Rekap Kebutuhan Akan Diklat	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.b Tersusunnya kualifikasi peserta Pelatihan Anti Korupsi	Daftar Kualifikasi Peserta Pelatihan Anti Korupsi	1. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.b Tersusunnya Perencanaan <i>Profiling</i> Penyuluh Anti Korupsi	Rencana Pelaksanaan <i>Profiling</i> Penyuluh Anti Korupsi (jadwal dan instrumen yang akan digunakan)	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				1.c Tersusunnya Rencana Aksi Internalisasi Anti Korupsi TA. 2023	Surat Penyampaian Dokumen Rencana Aksi	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.c Terlaksananya penyiapan instrumen Penilaian pemberian penghargaan Anti Korupsi TA. 2023	Undangan Rapat Persiapan, Notulensi dan Dokumentasi	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	1.c Terlaksananya internalisasi pemberian penghargaan Anti Korupsi di UPT	Laporan pelaksanaan internalisasi	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal
			2 Peningkatan Penilaian Integritas	2.a Tersusunnya Rencana Aksi Peningkatan Penilaian Integritas TA. 2023	Surat Penyampaian Dokumen Rencana Aksi Peningkatan Penilaian Integritas TA. 2023	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	2.a Terlaksananya Internalisasi Peningkatan Integritas	Laporan pelaksanaan Internalisasi Peningkatan Integritas	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	2.a Terlaksananya Penyiapan Data Populasi dan Sampel SPI 2023	Laporan Penyiapan Data Populasi dan Sampel SPI 2023	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi
				2.b Terlaksananya penyiapan Pelaksanaan SPI 2023			2.b Terlaksananya penyiapan Pelaksanaan SPI 2023	Laporan penyiapan Pelaksanaan SPI 2023	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	2.b -	-	-
			3 Jumlah Gap Kompetensi Manajerial Maupun Teknis masing-masing <30% untuk Pokja PBJ	3.a Tersusunnya Rencana Aksi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ	Surat Penyampaian Dokumen Rencana Aksi	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.a Terlaksananya Penyiapan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ dan Kualifikasinya	Laporan Penyiapan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ dan Kualifikasinya	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.a Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ dan Kualifikasinya	1. Laporan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ dan Kualifikasinya 2. Draft Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ dan Kualifikasinya	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

B. STRATEGI 2 : PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B12 (Desember 2022)			B15 (Maret 2023)			B18 (Juni 2023)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
			3 Jumlah Gap Kompetensi Manajerial Maupun Teknis masing-masing <30% untuk Pokja PBJ	3.b Terpentuknya tim penyusun Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ	SK Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.b -	-	-	3.b -	-	-
		2 Meningkatkan Jumlah Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas	Terbangunnya Zona Integritas	1.a Terlaksananya Penyampaian Surat Itjen kepada UNOR untuk mengusulkan UPT/Unit Organik Tahun 2023	Surat Permintaan Usulan UPT/Unit Organik untuk melakukan Pembangunan ZI	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.a Terlaksananya Pendampingan Pembangunan ZI terhadap UPT/Unit Organik yang diusulkan Tahun 2023	Laporan Pendampingan Pembangunan ZI terhadap UPT/Unit Organik yang diusulkan Tahun 2023	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	1.a Terlaksananya Penilaian Internal Pembangunan ZI Tahun 2023	Laporan Pelaksanaan Penilaian Internal Pembangunan ZI Tahun 2023	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal
							1.b Terlaksananya evaluasi pembangunan ZI tahun 2022 oleh TPI	Laporan evaluasi pembangunan ZI tahun 2022 oleh TPI	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	1.b -	-	-
		3 Menerapkan SMAP pada Unit Kerja penyelenggara layanan publik strategis	50% Unit Kerja penyelenggara layanan publik strategis tersertifikasi SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)	1.a Terlaksananya evaluasi/tinjauan penyelenggaraan SMAP pada unit kerja yang telah tersertifikasi	Laporan evaluasi/tinjauan penyelenggaraan SMAP pada unit kerja yang telah tersertifikasi (disampaikan kepada Menteri ditembuskan kepada Sekjen dan Irjen)	1. Unit Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Unit Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1.a Tersusunnya kriteria Pemilihan unit strategis pelayanan publik calon <i>Pilot Project</i> SMAP	Dokumen Kriteria Pemilihan unit strategis pelayanan publik calon <i>Pilot Project</i> SMAP	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.a Terselenggaranya pelatihan SNI ISO 37001:2016 SMAP pada unit strategis pelayanan publik yang menjadi <i>Pilot Project</i> SMAP	Laporan pelatihan SNI ISO 37001:2016 SMAP pada unit strategis pelayanan publik yang menjadi <i>Pilot Project</i> SMAP	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
				1.b Penyampaian Surat Itjen kepada UNOR untuk mengusulkan unit strategis pelayanan publik calon <i>Pilot Project</i> SMAP Tahun 2023	Surat Itjen kepada UNOR untuk mengusulkan unit strategis pelayanan publik calon <i>Pilot Project</i> SMAP Tahun 2023	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.b Tersusunnya daftar (nominasi) unit strategis pelayanan publik calon <i>Pilot Project</i> SMAP	Daftar (nominasi) unit strategis pelayanan publik calon <i>Pilot Project</i> SMAP	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	1.b Tersusunnya analisa kesenjangan pencapaian penerapan SMAP (<i>gap analysis</i>)	Dokumen analisa kesenjangan pencapaian penerapan SMAP (<i>gap analysis</i>)	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
							1.c Ditetapkannya unit strategis pelayanan publik <i>Pilot Project</i> SMAP	SK Penetapan unit strategis pelayanan publik <i>Pilot Project</i> SMAP	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	1.c Terbangunnya sistem SMAP	Dokumen sistem SMAP	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
							1.d Terselenggaranya internalisasi SNI ISO 37001:2016 SMAP pada unit strategis pelayanan publik yang menjadi nominasi calon <i>Pilot Project</i> SMAP	Laporan Penyelenggaraan internalisasi SNI ISO 37001:2016 SMAP pada unit strategis pelayanan publik yang menjadi nominasi calon <i>Pilot Project</i> SMAP	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	1.d Ditetapkannya Tim Fungsi Kepatuhan anti Penyuapan (Tim FKAP)	SK Tim Fungsi Kepatuhan anti Penyuapan (Tim FKAP)	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

B. STRATEGI 2 : Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B21 (September 2023)			B24 (Desember 2023)			B27 (Maret 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				2	Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Anti Korupsi	1 Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Antikorupsi	1 Penguatan Pengembangan Kompetensi SDM Antikorupsi	1.a Tersusunnya modul anti korupsi	Modul Anti Korupsi	1. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.a Terselenggaranya Pelatihan Anti Korupsi bagi PISK Gelombang 1	Laporan pelaksanaan Pelatihan Anti Korupsi bagi PISK
				1.b Terlaksananya <i>Profiling</i> pegawai sebagai Penyuluh Anti Korupsi	Laporan Pelaksanaan <i>Profiling</i> Pegawai	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.b Tersusunnya Perencanaan Pelatihan Penyuluh Anti Korupsi	Dokumen Rencana Pelatihan Penyuluh Anti Korupsi dan Internalisasi Penyuluh Anti Korupsi	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.b Terlaksananya Pelatihan Penyuluh Anti Korupsi	Laporan pelaksanaan Pelatihan Penyuluh Anti Korupsi	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				1.c Terlaksananya Penilaian dan Usulan Pemberian penghargaan internalisasi antikorupsi di unit kerja	Laporan pelaksanaan penilaian dan dan Usulan Pemberian penghargaan internalisasi antikorupsi di unit kerja	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	1.c Terselenggaranya pemberian penghargaan anti korupsi unit kerja	Laporan hasil penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan anti korupsi di unit kerja	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	1.c Tersusunnya instrumen penilaian integritas pegawai	Dokumen instrumen penilaian integritas pegawai	1. Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal
			2 Peningkatan Penilaian Integritas	2.a Terlaksananya SPI 2023	Laporan pelaksanaan SPI 2023	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	2.a Terlaksananya Penyampaian Hasil dan Analisis SPI 2023	Surat Penyampaian Hasil dan Analisis SPI 2023	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	2.a Terlaksananya Internalisasi Peningkatan Integritas	Laporan pelaksanaan internalisasi peningkatan integritas	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi
				2.b -	-	-	2.b Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Penilaian Integritas	Laporan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan peningkatan penilaian integritas	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	2.b Terlaksananya Pelaksanaan SPI 2024	Laporan penyiapan pelaksanaan SPI 2024	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi
							2.c Tersusunnya Rencana Aksi Peningkatan Penilaian Integritas TA. 2024	Surat Penyampaian Dokumen Rencana Aksi	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	2.c -	-	-

B. STRATEGI 2 : PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B21 (September 2023)			B24 (Desember 2023)			B27 (Maret 2024)					
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB			
			3 Jumlah Gap Kompetensi Manajerial Maupun Teknis masing-masing <30% untuk Pokja PBJ	3.a	Terlaksananya Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ dan Kualifikasinya	Surat Penyampaian Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ dan Kualifikasinya	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.a	Terlaksananya <i>Pilot Project Profiling</i> Pokja PBJ sesuai Standar Kompetensi dan Kualifikasinya (50 orang)	Laporan pelaksanaan <i>pilot project profiling</i>	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.a	Terlaksananya Evaluasi Hasil <i>Pilot Project Profiling</i> untuk Menentukan Pengembangan Kompetensi yang diperlukan Pokja PBJ	Laporan Evaluasi Hasil <i>Pilot Project Profiling</i> untuk Menentukan Pengembangan Kompetensi yang diperlukan Pokja PBJ	1. Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				3.b	Terlaksananya Persiapan <i>Profiling</i> Pokja PBJ (Asesor, Penilai Teknis, Usulan Peserta)	Laporan persiapan <i>Profiling</i> Pokja PBJ	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.b	-	-	-	3.b	Tersusunnya Draf Katalog dan Materi Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ berbasis <i>GAP</i>	Draf Katalog dan Materi Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ berbasis <i>GAP</i>	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				3.c	Terlaksananya Penyiapan Integrasi data e-HRD, e-Kom, dan Katalog Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ	Laporan Penyiapan Integrasi data e-HRD, e-Kom, dan Katalog Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ		3.c	Terlaksananya Penyiapan Integrasi data e-HRD, e-Kom, dan Katalog Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ	Laporan Penyiapan Integrasi data e-HRD, e-Kom, dan Katalog Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ		3.c	Terlaksananya Penyiapan <i>Feedback</i> Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ	Laporan Penyiapan <i>Feedback</i> Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ	1. Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				3.d	Terlaksananya Penyiapan <i>Feedback</i> Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ	Laporan Penyiapan <i>Feedback</i> Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ		3.d	Terlaksananya Penyiapan <i>Feedback</i> Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ	Laporan Penyiapan <i>Feedback</i> Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ		3.d	Terlaksananya Pendampingan Penilaian Tim Penilai Nasional Pembangunan ZI terhadap UPT/Unit Organik yang diusulkan Tahun 2024	Laporan Pendampingan Pembangunan ZI terhadap UPT/Unit Organik yang diusulkan Tahun 2024	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi
				1.a	Terlaksananya Pendampingan Penilaian Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Tahun 2023 (kumulatif) pada 75 UPT	Laporan Pendampingan Penilaian Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Tahun 2023 (kumulatif) pada 75 UPT	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.a	Terlaksananya Pendampingan Penilaian Tim Penilai Nasional Pembangunan ZI Tahun 2023	Laporan Pendampingan Penilaian Tim Penilai Nasional Pembangunan ZI Tahun 2023	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.a	Terlaksananya Pendampingan Pembangunan ZI terhadap UPT/Unit Organik yang diusulkan Tahun 2024	Laporan Pendampingan Pembangunan ZI terhadap UPT/Unit Organik yang diusulkan Tahun 2024	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi
				1.a	Terlaksananya Pendampingan Penilaian Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Tahun 2023 (kumulatif) pada 75 UPT	Laporan Pendampingan Penilaian Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Tahun 2023 (kumulatif) pada 75 UPT	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.a	Terlaksananya Pendampingan Penilaian Tim Penilai Nasional Pembangunan ZI Tahun 2023	Laporan Pendampingan Penilaian Tim Penilai Nasional Pembangunan ZI Tahun 2023	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.a	Terlaksananya Pendampingan Pembangunan ZI terhadap UPT/Unit Organik yang diusulkan Tahun 2024	Laporan Pendampingan Pembangunan ZI terhadap UPT/Unit Organik yang diusulkan Tahun 2024	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi
				1.a	Terlaksananya Pendampingan Penilaian Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Tahun 2023 (kumulatif) pada 75 UPT	Laporan Pendampingan Penilaian Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Tahun 2023 (kumulatif) pada 75 UPT	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.a	Terlaksananya Pendampingan Penilaian Tim Penilai Nasional Pembangunan ZI Tahun 2023	Laporan Pendampingan Penilaian Tim Penilai Nasional Pembangunan ZI Tahun 2023	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.a	Terlaksananya Pendampingan Pembangunan ZI terhadap UPT/Unit Organik yang diusulkan Tahun 2024	Laporan Pendampingan Pembangunan ZI terhadap UPT/Unit Organik yang diusulkan Tahun 2024	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi

B. STRATEGI 2 : Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Anti Korupsi

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B21 (September 2023)			B24 (Desember 2023)			B27 (Maret 2024)					
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB			
				1.b	-	-	1.b	Penyampaian Surat Itjen kepada UNOR untuk mengusulkan UPT/Unit Organik Tahun 2024	Surat Permintaan Usulan UPT/Unit Organik untuk melakukan Pembangunan ZI	Inspektorat VI, ITJEN	1.b	Terlaksananya evaluasi pembangunan ZI tahun 2023 oleh TPI	Laporan evaluasi pembangunan ZI tahun 2023 oleh TPI	1. Inspektorat VI, ITJEN 2. KI UNOR	
		3 Menerapkan SMAP pada Unit Kerja penyelenggara layanan publik strategis	50% Unit Kerja penyelenggara layanan publik strategis tersertifikasi SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan)	1.a	Terselenggaranya sosialisasi SMAP kepada para <i>stakeholder</i> eksternal	Laporan sosialisasi SMAP kepada para <i>stakeholder</i> eksternal	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	1.a	Terlaksananya audit internal SMAP	Laporan audit internal SMAP	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	1.a	Terselenggaranya internalisasi SNI ISO 37001:2016 SMAP pada unit strategis pelayanan publik <i>Pilot Project</i> SMAP	Laporan internalisasi SNI ISO 37001:2016 SMAP pada unit strategis pelayanan publik <i>Pilot Project</i> SMAP	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
	1.b			Terselenggaranya penerapan SMAP	Laporan penerapan SMAP	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	1.b	Terlaksananya audit eksternal SMAP (Sertifikasi ISO)	Laporan audit eksternal SMAP (Sertifikasi ISO)	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	1.b	-	-	-	
	1.c			Terselenggaranya pemilihan lembaga sertifikasi ISO SMAP	Dokumen penunjukan lembaga sertifikasi ISO SMAP	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	1.c	Tersusunnya draf pedoman <i>monitoring</i> dan evaluasi penerapan SMAP	Dokumen draf pedoman <i>monitoring</i> dan evaluasi penerapan SMAP	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.c	Tersusunnya pedoman <i>monitoring</i> dan evaluasi penerapan SMAP	Dokumen pedoman <i>monitoring</i> dan evaluasi penerapan SMAP	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	
	1.d			-	-	-	1.d	-	-	-	1.d	-	-	-	

B. STRATEGI 2 : Penguatan SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B30 (Juni 2024)			B33 (September 2024)			B36 (Desember 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				2	Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Anti Korupsi	1 Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Anti Korupsi	1 Penguatan Pengembangan Kompetensi SDM Antikorupsi	1.a Terselenggaranya Pelatihan Anti Korupsi bagi PISK Gelombang 3	Laporan pelaksanaan Pelatihan Anti Korupsi bagi PISK	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.a Terselenggaranya Pelatihan Anti Korupsi bagi PISK Gelombang 4	Laporan pelaksanaan Pelatihan Anti Korupsi bagi PISK
1.a.1	Terlaksananya penyiapan Instrumen Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Pengembangan Kompetensi SDM antikorupsi	Laporan pelaksanaan penyiapan Instrumen Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Pengembangan Kompetensi SDM antikorupsi	1. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.b	Tersertifikasinya 10 orang Pegawai untuk masing-masing unor ABCP, dan 1 orang pegawai untuk masing-masing unor SIBB sebagai Penyuluh Anti Korupsi	Sertifikat Penyuluh Anti Korupsi	1. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.c	Terlaksananya uji instrumen integritas	Laporan pelaksanaan uji instrumen integritas	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.c Terlaksananya Uji Integritas pada 5% Wajib Lapo LHKPN	Laporan pelaksanaan uji integritas pada 5% wajib lapo LHKPN	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.c Pelaksanaan Uji Integritas pada 10% Wajib Lapo LHKPN	Laporan pelaksanaan uji integritas pada 10% wajib lapo LHKPN	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.c Pelaksanaan Uji Integritas pada 10% Wajib Lapo LHKPN	Laporan pelaksanaan uji integritas pada 10% wajib lapo LHKPN	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		2 Peningkatan Penilaian Integritas	2.a Terlaksananya Penyiapan Data Populasi dan Sampel SPI 2024	Laporan Penyiapan Data Populasi dan Sampel SPI 2024	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	2.a Terlaksananya SPI 2024	Laporan pelaksanaan SPI 2024	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	2.a Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Penilaian Integritas	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Penilaian Integritas	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	
			2.b -	-	-	2.b -	-	-	2.b -	-	-	
			2.c -	-	-	2.c -	-	-	2.c -	-	-	

B. STRATEGI 2 : Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Anti Korupsi

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B30 (Juni 2024)			B33 (September 2024)			B36 (Desember 2024)					
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB			
			3 Jumlah Gap Kompetensi Manajerial Maupun Teknis masing-masing <30% untuk Pokja PBJ	3.a	Terlaksana Penyiapan pengembangan kompetensi Pokja PBJ berbasis GAP	Laporan Penyiapan pengembangan kompetensi Pokja PBJ berbasis GAP	1. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.a	Terseleenggaranya pengembangan kompetensi Pokja PBJ berbasis GAP	Laporan pengembangan kompetensi Pokja PBJ berbasis GAP	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.a	Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ berbasis GAP	Laporan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ berbasis GAP	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				3.b	Tersusunnya Katalog dan Materi Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ berbasis GAP	Surat penyampaian dokumen Katalog dan Materi Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ berbasis GAP	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.b	-	-	-	-	-	-	-
				3.c	Terlaksana Integrasi data e-HRD, e-Kom, dan Katalog Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ	Laporan pelaksanaan Integrasi data e-HRD, e-Kom, dan Katalog Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ	1. Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Pusat 4, BPSDM	3.c	-	-	-	-	-	-	-
				3.d	Terlaksana <i>Feedback</i> Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ	Laporan pelaksanaan <i>Feedback</i> Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.d	-	-	-	-	-	-	-
		2 Meningkatkan Jumlah Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas	Terbangunnya Zona Integritas	1.a	Terlaksananya Penilaian Internal Pembangunan ZI Tahun 2024	Laporan Pelaksanaan Penilaian Internal Pembangunan ZI Tahun 2024	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.a	Terlaksananya Pendampingan Penilaian Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Tahun 2024 (kumulatif) pada 150 UPT	Laporan Pendampingan Penilaian Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Tahun 2024 (kumulatif) pada 150 UPT	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.a	Terlaksananya Pendampingan Penilaian Tim Penilai Nasional Pembangunan ZI Tahun 2024	Laporan Pendampingan Penilaian Tim Penilai Nasional Pembangunan ZI Tahun 2024	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal

B. STRATEGI 2 : Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Anti Korupsi

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B30 (Juni 2024)			B33 (September 2024)			B36 (Desember 2024)					
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB			
				1.b	-	-	1.b	-	-	1.b	Penyampaian Surat Inspektorat Jenderal kepada Unit Organisasi untuk mengusulkan UPT/Unit Organik Tahun 2025	Surat Permintaan Usulan UPT/Unit Organik untuk melakukan Pembangunan ZI	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal		
		3 Menerapkan SMAP pada Unit Kerja penyelenggara layanan publik strategis	50% Unit Kerja penyelenggara layanan publik strategis tersertifikasi SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyupaan)	1.a	Terselenggaranya sosialisasi SMAP kepada para <i>stakeholder</i> eksternal	Laporan sosialisasi SMAP kepada para <i>stakeholder</i> eksternal	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	1.a	Terlaksananya audit internal SMAP (<i>surveillance</i>)	Laporan audit internal SMAP (<i>surveillance</i>)	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	1.a	Terlaksananya audit eksternal SMAP (<i>surveillance</i>)	Laporan audit eksternal SMAP (<i>surveillance</i>)	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
				1.b	Terselenggaranya penerapan SMAP	Laporan penerapan SMAP Semester I TA 2024 (Laporan tinjauan manajemen puncak)	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	1.b	Terselenggaranya penunjukan lembaga sertifikasi SMAP (<i>surveillance</i>)	Dokumen penunjukan lembaga sertifikasi SMAP (<i>surveillance</i>)	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	1.b	Terlaksananya penerapan SMAP (<i>surveillance</i> semester II)	Laporan tinjauan manajemen puncak (<i>surveillance</i> semester II)	1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
				1.c	-	-	-	1.c	Terselenggaranya <i>monitoring</i> dan evaluasi penerapan SMAP	Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi penerapan SMAP	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.c	Terlaksananya <i>reviu</i> dan rekomendasi penerapan SMAP	Dokumen <i>reviu</i> dan rekomendasi penerapan SMAP	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal
				1.d	-	-	-	1.d	-	-	-	1.d	-	-	-

C. STRATEGI 3: PEMANTAPAN KEANDALAN PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B12 (Desember 2022)			B15 (Maret 2023)			B18 (Juni 2023)					
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB			
3	Pemantapan Keandalan Penyusunan HPS	1 Pengembangan Keandalan SIPASTI Versi 3.0: Menyeragamkan Penentuan Harga Satuan Pokok Wilayah	Terseragamkan Harga Satuan Pokok Wilayah dalam lokasi pekerjaan yang berdekatan	1.a	Tersusunnya Kriteria Evaluasi Pelaksanaan Pengumpulan Data/ Survey 2022	Formulir Evaluasi Pelaksanaan Pengumpulan Data/ Survey 2022	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.a	Terlaksananya FGD Pengembangan Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah	Tersedianya Peta Jalan (<i>Road Map</i>) dan Rencana Strategis (<i>Strategic Plan</i>)	1. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 3. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	1.a	Terlaksananya Strategi 2: Interoperabilitas/ Integrasi Sistem Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah	Bukti Dukung Pelaksanaan Strategi 2	1. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi 2. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi 3. Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal
				1.b	Tersusunnya Kriteria Evaluasi Pelaksanaan Pengumpulan Data/ Survey 2022	Formulir Evaluasi Pelaksanaan Pengumpulan Data/ Survey 2022	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.b	Terlaksananya Strategi 1: Kerjasama Pengembangan Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah	Bukti Dukung Pelaksanaan Strategi 1	1. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 3. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal				
		2 Pengembangan Keandalan SIPASTI Versi 3.0: Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Fitur SIPASTI (Pengembangan Versi 3.0)	1 Terjaminnya Kesesuaian Sistem Perhitungan HPS dengan Peraturan Menteri PUPR No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR	2.a	Tersusunnya Kriteria Evaluasi Kinerja SIPASTI Versi 2.0	Formulir Evaluasi Kinerja SIPASTI Versi 2.0	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2.a	Tersedianya Pemutakhiran Peraturan Menteri PUPR No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR	Dokumen Pemutakhiran Lampiran Permen 01/2022	1. Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air 2. Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan 3. Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Perumahan 4. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi	2.a	Tersedianya Pengembangan Fitur Perhitungan	Screenshot Fitur Perhitungan	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
				2	Tersedianya Proses Pembahasan, Penetapan, dan Reviu HPS Akuntabel			2.b	Tersedianya Konsep Pengembangan Fitur Sistem Perhitungan HPS V3 berdasarkan pemutakhiran Peraturan Menteri PUPR No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR	Dokumen Konsep Pengembangan Fitur Perhitungan SIPASTI V3	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2.b	Terlaksananya FGD Penyusunan Integrasi dengan LPSE	Konsep Integrasi dengan LPSE	1. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi 2. Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal
												2.c	Terlaksananya <i>Workshop</i> Uji Coba Versi 3.0 Tahap 1	Laporan Evaluasi dan Pelaksanaan	1. Direktorat Bina Teknik (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan) 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 3. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

C. STRATEGI 3: PEMANTAPAN KEANDALAN PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B12 (Desember 2022)			B15 (Maret 2023)			B18 (Juni 2023)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
3	Pemantapan Keandalan Penyusunan HPS	3 Penggunaan/ Penerapan SIPASTI guna meningkatkan kualitas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Kementerian PUPR: Penerapan SIPASTI Versi 3.0	Terlaksananya Penerapan SIPASTI Versi 3.0	3.a Tersusunnya Kriteria Evaluasi Kinerja SIPASTI Versi 2.0	Formulir Evaluasi Kinerja SIPASTI Versi 2.0	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3.a Terlaksananya FGD Evaluasi Pengembangan dan Penerapan SIPASTI Versi 2.0	Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan dan Penerapan SIPASTI Versi 2.0	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3.a Tersedianya Surat Sekretaris Jenderal terkait Uji Coba Tahap 1 dan 2 SIPASTI Versi 3.0	Surat Sekretaris Jenderal terkait Uji Coba Tahap 1 dan 2 SIPASTI Versi 3.0	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
		4 Penggunaan/ Penerapan SIPASTI guna meningkatkan kualitas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Kementerian PUPR: Dukungan Penerapan SIPASTI Versi 3.0	Tersedianya Dukungan Penerapan SIPASTI Versi 3.0	4.a Tersusunnya SK Sekretaris Jenderal tentang Tim SIPASTI	SK Sekretaris Jenderal tentang Tim SIPASTI	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	4.a Terlaksananya pembahasan Harmonisasi SOP Mekanisme Pembahasan Usulan HPS	Draf Pedoman tentang SOP Mekanisme Pembahasan Usulan HPS (Draft SE Menteri PUPR)	1. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	4.a Tersusunannya Pedoman tentang SOP Mekanisme Pembahasan Usulan HPS	Pedoman tentang SOP Mekanisme Pembahasan Usulan HPS (SE Menteri PUPR)	1. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
										3.b Terdatanya Paket Uji Coba Tahap 1 dan 2	Data Paket Uji Coba	1. Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan

C. STRATEGI 3: PEMANTAPAN KEANDALAN PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B21 (September 2023)			B24 (Desember 2023)			B27 (Maret 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
3	Pemantapan Keandalan Penyusunan HPS	1 Pengembangan Keandalan SIPASTI Versi 3.0: Menyeragamkan Penentuan Harga Satuan Pokok Wilayah	Terseragamkan Harga Satuan Pokok Wilayah dalam lokasi pekerjaan yang berdekatan	1.a Terlaksananya Strategi 3: Tersedianya Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah yang Terintegrasi dengan SIPASTI	Bukti Dukung Pelaksanaan Strategi 3	1. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 3. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	1.a Termanfaatkannya Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah di SIPASTI	Laporan Pemanfaatan Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah di SIPASTI	1. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 3. Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	1.a Terlaksananya Evaluasi Pemanfaatan Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah (Tahap 1)	Laporan Evaluasi	1. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
		2 Pengembangan Keandalan SIPASTI Versi 3.0: Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Fitur SIPASTI (Pengembangan Versi 3.0)	1 Terjaminnya Kesesuaian Sistem Perhitungan HPS dengan Peraturan Menteri PUPR No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR	2.a Tersedianya Pengembangan: Fitur Pembahasan, Penetapan, Reviu HPS Fitur <i>Monitoring</i>	<i>Screenshot</i> Fitur	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2.a -	-	-	2.a Terlaksananya Evaluasi Pemanfaatan dalam Penerapan SIPASTI (Tahap 1)	Laporan Evaluasi	1. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 3. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
		2 Tersedianya Proses Pembahasan, Penetapan, dan Reviu HPS Akuntabel	2.c Terlaksananya <i>Workshop</i> Uji Coba Versi 3.0 Tahap 2	Laporan Evaluasi dan Pelaksanaan Uji Coba Versi 3.0 Tahap 2	1. Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 3. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2.c -	-	-				

C. STRATEGI 3: PEMANTAPAN KEANDALAN PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B21 (September 2023)			B24 (Desember 2023)			B27 (Maret 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
3	Pemantapan Keahlian Penyusunan HPS	3 Penggunaan/ Penerapan SIPASTI guna meningkatkan kualitas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Kementerian PUPR: Penerapan SIPASTI Versi 3.0	Terlaksananya Penerapan SIPASTI Versi 3.0	3.a Tersedianya Surat Menteri terkait Penerapan SIPASTI Versi 3.0: 1. Penerapan (Pilot Project) SIPASTI - Soft Launching 2. Penerapan (Keseluruhan) SIPASTI - Launching	Surat Menteri terkait Penerapan SIPASTI Versi 3.0	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3.a Terlaksananya Workshop Penerapan (Pilot Project) SIPASTI Versi 3.0 di 34 Provinsi (Soft Launching)	Laporan Evaluasi dan Pelaksanaan	1. Direktorat Teknis Pembina/ Sektoral 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan 3. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3.a Terlaksananya Implementasi Penerapan SIPASTI (Tahap 1)	Laporan Implementasi Penerapan	1. Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan
				3.b Terdatanya Paket Penerapan (Pilot Project) SIPASTI Versi 3.0 - Soft Launching	Data Paket Penerapan	1. Direktorat Teknis Pembina/ Sektoral 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan	3.b Terlaksananya Launching Penerapan SIPASTI di Kementerian PUPR	Laporan Pelaksanaan	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3.b -	-	-
				4.a Tersedianya Draf Pedoman Operasional Penggunaan SIPASTI	Draf Pedoman Operasional Penggunaan SIPASTI	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	4.a Diterbitkannya Pedoman Operasional Penggunaan SIPASTI	Surat dan Pedoman Operasional Penggunaan SIPASTI	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	4.a Terlaksananya sosialisasi Pedoman Operasional Penggunaan SIPASTI	Laporan pelaksanaan sosialisasi	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
		4.b -	-	-	4.b Terlaksananya rapat pembahasan Konsep Pelatihan Penggunaan SIPASTI (Modul, Program Pelatihan, dll)	Laporan rapat pembahasan	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, BPSDM	4.b Tersedianya Konsep Pelatihan Penggunaan SIPASTI (Modul, Program Pelatihan, dll)	Dokumen Konsep Pelatihan Penggunaan SIPASTI (Modul, Program Pelatihan, dll)	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, BPSDM		
		4.c Terlaksananya sosialisasi Pedoman tentang SOP Mekanisme Pembahasan Usulan HPS (SE Menteri PUPR)	Laporan pelaksanaan sosialisasi	Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	4.c Terlaksananya sosialisasi SE Menteri PUPR tentang Pedoman tentang SOP Mekanisme Pembahasan Usulan HPS di masing-masing UNOR	Laporan pelaksanaan sosialisasi	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan	4.c -	-	-		
		4.d -	-	-								

C. STRATEGI 3: PEMANTAPAN KEANDALAN PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B30 (Juni 2024)			B33 (September 2024)			B36 (Desember 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
3	Pemantapan Keandalan Penyusunan HPS	1 Pengembangan Keandalan SIPASTI Versi 3.0: Menyeragamkan Penentuan Harga Satuan Pokok Wilayah	Terseragamkan Harga Satuan Pokok Wilayah dalam lokasi pekerjaan yang berdekatan	1 Terlaksananya <i>Workshop</i> Pengembangan dan Perbaikan Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah (Tahap 1)	Laporan pelaksanaan <i>workshop</i>	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1 Terlaksananya Evaluasi Pemanfaatan Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah (Tahap 2 & 3)	Laporan Evaluasi	1. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1 Terlaksananya <i>Workshop</i> Pengembangan dan Perbaikan Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah (Tahap 2 & 3)	Laporan pelaksanaan <i>workshop</i>	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
		2 Pengembangan Keandalan SIPASTI Versi 3.0: Meningkatkan Kualitas dan Akutabilitas Fitur SIPASTI (Pengembangan Versi 3.0)	1 Terjaminnya Kesesuaian Sistem Perhitungan HPS dengan Peraturan Menteri PUPR No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR 2 Tersedianya Proses Pembahasan, Penetapan, dan Reviu HPS Akutabel	2 Terlaksananya <i>Workshop</i> Pengembangan dan Perbaikan Fitur SIPASTI (Tahap 1)	Laporan pelaksanaan <i>workshop</i>	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2 Terlaksananya Evaluasi Pemanfaatan dalam Penerapan SIPASTI (Tahap 2 & 3)	Laporan Evaluasi	1. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2 Terlaksananya <i>Workshop</i> Pengembangan dan Perbaikan Fitur SIPASTI (Tahap 2 & 3)	Laporan pelaksanaan <i>workshop</i>	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
		3 Penggunaan/ Penerapan SIPASTI guna meningkatkan kualitas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Kementerian PUPR: Penerapan SIPASTI Versi 3.0	Terlaksananya Penerapan SIPASTI Versi 3.0	3 Terlaksananya Implementasi Penerapan SIPASTI (Tahap 2)	Laporan Implementasi Penerapan	1. Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan	3 Terlaksananya Implementasi Penerapan SIPASTI (Tahap 3)	Laporan Implementasi Penerapan	1. Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan	3 Terlaksananya Implementasi Penerapan SIPASTI (Tahap 4)	Laporan Implementasi Penerapan	1. Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan
		4 Penggunaan/ Penerapan SIPASTI guna meningkatkan kualitas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Kementerian PUPR: Dukungan Penerapan SIPASTI Versi 3.0	Tersedianya Dukungan Penerapan SIPASTI Versi 3.0	4.a Tersedianya Pedoman Pelatihan Penggunaan SIPASTI (Modul, Program Pelatihan, dll)	Pedoman Pelatihan Penggunaan SIPASTI (Modul, Program Pelatihan, dll)	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, BPSDM	4.a Terlaksananya Pelatihan Penggunaan SIPASTI Tahap 1 4.b Terlaksananya implementasi SE Menteri PUPR tentang Pedoman dan SOP Mekanisme Pembahasan Usulan HPS	Laporan pelaksanaan pelatihan Laporan Implementasi Penerapan	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, BPSDM 1. Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan	4.a Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pelatihan penggunaan SIPASTI Tahap 1	Laporan evaluasi	1. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, BPSDM 2. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

D. STRATEGI 4: PENINGKATAN PEMBINAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B12 (Desember 2022)			B15 (Maret 2023)			B18 (Juni 2023)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
4	Peningkatan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi	1 Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengalaman dan Profil Penyedia Jasa dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Tersedianya basis data pengalaman dan profil penyedia jasa yang teruji sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang terdapat dalam sistem informasi pengalaman dan profil Penyedia Jasa	1.a Identifikasi permasalahan (secara internal) untuk optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pengalaman dan Profil Penyedia Jasa (SIMPAN)	Dokumen Identifikasi permasalahan	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	1.a Terlaksananya persiapan FGD dalam rangka optimalisasi SIMPAN	Laporan persiapan FGD dalam rangka optimalisasi SIMPAN	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	1.a Terlaksananya FGD dalam rangka optimalisasi SIMPAN	Laporan pelaksanaan FGD dalam rangka optimalisasi SIMPAN	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
							1.b Ditetapkannya target pengisian SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar per akhir tahun 2024	Dokumen target pengisian SIMPAN	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	1.b Terlaksananya pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 1)	Laporan pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
									1.c Terlaksananya <i>movev</i> hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 1)	Laporan <i>movev</i> hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	
		2 Pemanfaatan SPSE untuk <i>inputting</i> data SIMPAN	Terintegrasinya elemen data SPSE dalam SIMPAN	Terlaksananya rapat pembahasan penyiapan elemen data SPSE yang akan digunakan dalam optimalisasi SIMPAN	Notulensi rapat, surat undangan, daftar hadir	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 4. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 5. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2.a Terlaksananya rapat pembahasan lanjutan dalam penyiapan elemen data SPSE yang akan digunakan dalam optimalisasi SIMPAN	Notulensi rapat, surat undangan, daftar hadir	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 4. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Terlaksananya kesepakatan dengan LKPP untuk pencantuman elemen data SPSE yang akan digunakan dalam optimalisasi SIMPAN merujuk pada Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ada	Berita Acara Kesepakatan/ Notulen elemen data SPSE yang akan digunakan pada aplikasi SIMPAN berdasarkan PKS yang sedang berjalan	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 4. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 5. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
					2.b Terlaksananya penyiapan draf elemen data SPSE yang akan digunakan dalam optimalisasi SIMPAN	Dokumen daftar elemen data SPSE yang akan digunakan						

D. STRATEGI 4: PENINGKATAN PEMBINAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B12 (Desember 2022)			B15 (Maret 2023)			B18 (Juni 2023)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
		Penerapan SMAP pada Penyedia Jasa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa	Tersedianya data penerapan SMAP di organisasi/perusahaan penyedia jasa kualifikasi besar	Terlaksananya rapat persiapan penyusunan rencana kerja penerapan SMAP pada penyedia jasa sesuai dengan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022	Notulensi rapat, surat undangan dan daftar hadir	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	3.a Terlaksananya pembahasan penyusunan rencana kerja penerapan SMAP pada penyedia jasa sesuai dengan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022	Notulensi rapat, surat undangan dan daftar hadir	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	3.a Terlaksananya sosialisasi rencana kerja penerapan SMAP pada penyedia jasa sesuai dengan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022	Laporan sosialisasi	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
							3.b Ditetapkannya rencana kerja dalam bentuk nota dinas oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Nota dinas perihal dokumen rencana kerja	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	3.b -	-	-
							3.c Tersusunnya Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi kepada para penyedia jasa tentang pelaksanaan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi	Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	3.c Terlaksananya distribusi surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi kepada para penyedia jasa tentang pelaksanaan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022	Tanda terima surat	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

D. STRATEGI 4: PENINGKATAN PEMBINAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

NO	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B21 (September 2023)			B24 (Desember 2023)			B27 (Maret 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
4	Peningkatan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi	1 Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengalaman dan Profil Penyedia Jasa dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Tersedianya basis data pengalaman dan profil penyedia jasa yang teruji sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang terdapat dalam sistem informasi pengalaman dan profil Penyedia Jasa	1.a Tersusunnya usulan perbaikan SIMPAN berdasarkan hasil FGD pada B18	Nota Dinas Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi kepada Dirjen Bina Konstruksi tentang perbaikan SIMPAN	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	1.a Terlaksananya analisis capaian target SIMPAN yang ditetapkan di B15	Dokumen analisis capaian target SIMPAN yang ditetapkan di B15	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	1.a -	-	-
				1.b Terlaksananya pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 2)	Laporan pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	1.b Terlaksananya Pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 3)	Laporan pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	1.b Terlaksananya Pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 4)	Laporan pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
				1.c Terlaksananya <i>monev</i> hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 2)	Laporan <i>monev</i> hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	1.c Terlaksananya <i>monev</i> hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 3)	Laporan <i>monev</i> hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	1.c Terlaksananya <i>monev</i> hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 4)	Laporan <i>monev</i> hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
				1.d Terlaksananya penyiapan penetapan pencapaian target SIMPAN yang harus dicapai di B36	Laporan penyiapan penetapan pencapaian target SIMPAN yang harus dicapai di B36	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	1.d Terlaksananya penyiapan penetapan pencapaian target SIMPAN yang harus dicapai di B36	Laporan penyiapan penetapan pencapaian target SIMPAN yang harus dicapai di B36	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	1.d Ditetapkannya capaian target SIMPAN yang harus dicapai di B36	Dokumen capaian target SIMPAN di B36	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
		2 Pemanfaatan SPSE untuk <i>inputting</i> data SIMPAN	Terintegrasinya elemen data SPSE dalam SIMPAN	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 4. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 5. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Terlaksananya Uji Coba Integrasi elemen data SPSE yang akan digunakan dalam optimalisasi SIMPAN	<i>Screenshot</i> integrasi pada aplikasi SIMPAN	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 4. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 5. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Laporan pelaksanaan Uji Coba Integrasi elemen data SPSE yang akan digunakan dalam optimalisasi SIMPAN	Laporan publikasi/rilis sistem berdasarkan hasil uji coba	Terlaksananya publikasi/rilis sistem berdasarkan hasil uji coba	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 4. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 5. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	<i>Screenshot</i> publikasi/rilis SPSE dan SIMPAN Terintegras

D. STRATEGI 4: PENINGKATAN PEMBINAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

NO	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B21 (September 2023)			B24 (Desember 2023)			B27 (Maret 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
		3 Penerapan SMAP pada Penyedia Jasa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa	Tersedianya data penerapan SMAP di organisasi/perusahaan penyedia jasa kualifikasi besar	Terlaksananya <i>monitoring</i> (tahap 1 di TA 2023) atas kepatuhan penerapan SMAP pada saat mengajukan permohonan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) pada Penyedia Jasa Kualifikasi Besar	Laporan <i>monitoring</i>	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Terlaksananya <i>monitoring</i> (tahap 2 di TA 2023) atas kepatuhan penerapan SMAP pada saat mengajukan permohonan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) pada Penyedia Jasa Kualifikasi Besar	Laporan <i>monitoring</i>	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Terlaksananya sosialisasi rencana kerja penerapan SMAP pada penyedia jasa sesuai dengan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022	Laporan sosialisasi	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

D. STRATEGI 4: PENINGKATAN PEMBINAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

NO	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B30 (Juni 2024)			B33 (September 2024)			B36 (Desember 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
4	Peningkatan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi	1 Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen dan Profil Penyedia Jasa dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Tersedianya basis data pengalaman dan profil penyedia jasa yang teruji sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang terdapat dalam sistem informasi pengalaman dan profil Penyedia Jasa	1.a -	-	-	1.a -	-	-	1.a Terlaksananya analisis capaian target SIMPAN yang ditetapkan di B27	Dokumen analisis capaian target SIMPAN yang ditetapkan di B27	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
				1.b Terlaksananya Pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 5)	Laporan pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	1.b Terlaksananya Pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 6)	Laporan pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	1.b Terlaksananya Pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 7)	Laporan pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
				1.c Terlaksananya <i>movev</i> hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 5)	Laporan <i>movev</i> hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	1.c Terlaksananya <i>movev</i> hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 6)	Laporan <i>movev</i> hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	1.c Terlaksananya <i>movev</i> hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 7)	Laporan <i>movev</i> hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
				1.d -	-	-	1.d -	-	-	1.d -	-	-
		2 Pemanfaatan SPSE untuk <i>inputting</i> data SIMPAN	Terintegrasinya elemen data SPSE dalam SIMPAN	Terlaksananya <i>monitoring</i> dan evaluasi <i>inputting data</i> SIMPAN menggunakan elemen data SPSE	Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi <i>inputting data</i> SIMPAN menggunakan elemen data SPSE	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 4. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 5. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	-	-	-	Terlaksananya <i>monitoring</i> dan evaluasi lanjutan dalam <i>inputting</i> data SIMPAN menggunakan elemen data SPSE	Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi <i>inputting</i> data SIMPAN menggunakan elemen data SPSE	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 4. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 5. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
		3 Penerapan SMAP pada Penyedia Jasa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa	Tersedianya data penerapan SMAP di organisasi/perusahaan penyedia jasa kualifikasi besar	Terlaksananya <i>monitoring</i> (tahap 1 di TA 2024) atas kepatuhan penerapan SMAP pada saat mengajukan permohonan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) pada Penyedia Jasa Kualifikasi Besar	Laporan <i>monitoring</i>	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Terlaksananya <i>monitoring</i> (tahap 2 di TA 2024) atas kepatuhan penerapan SMAP pada saat mengajukan permohonan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) pada Penyedia Jasa Kualifikasi Besar	Laporan <i>monitoring</i>	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Terlaksananya <i>monitoring</i> (tahap 3 di TA 2024) atas kepatuhan penerapan SMAP pada saat mengajukan permohonan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) pada Penyedia Jasa Kualifikasi Besar	Laporan <i>monitoring</i>	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

E. STRATEGI 5: PENINGKATAN TATA KELOLA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B12 (Desember 2022)			B15 (Maret 2023)			B18 (Juni 2023)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
5	Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	1 Meningkatkan tata kelola pekerjaan konstruksi berbasis digital	1 Peningkatan kualitas dan kuantitas penerapan teknologi <i>Building Information Modeling</i> (BIM) pada proyek konstruksi sejak tahap perencanaan sampai tahap operasi dan pemeliharaan	1.a Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dengan target 300 ASN	Laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.a Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dengan target 100 ASN (Tahap 1)	Laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.a Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dengan target 100 ASN (Tahap 2)	Laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
				1.b Pengajuan Rancangan SKKNI (RSKKNI) Bidang BIM ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk penetapan	Dokumen RSKKNI BIM	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	-	-	-	-	-	-
				1.c Diterbitkannya buku Profil Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan BIM di PUPR TA 2022	Buku Profil Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan BIM di PUPR TA 2022	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.b Terlaksananya sosialisasi profil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan BIM di PUPR TA 2022	Laporan kegiatan sosialisasi	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.b Terlaksananya <i>monitoring daring/online</i> implementasi BIM pada seluruh proyek PSN TA.2022-2023 dengan kriteria progress pekerjaan di atas 50% (Tahap II)	Laporan kegiatan <i>monitoring</i>	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
				1.d Ditetapkannya buku Pedoman Pemantauan dan Evaluasi penerapan BIM Pada Proyek Konstruksi di Kementerian PUPR	Buku Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penerapan BIM di proyek konstruksi Kementerian PUPR	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.c Terlaksananya <i>workshop</i> dan sosialisasi pedoman dan panduan BIM eksisting yang ada di PUPR (produk pedoman 2017-2019, standar protokol penerapan BIM Edisi 1.0 Tahun 2020, pedoman <i>movev</i> BIM 2022)	Laporan kegiatan <i>workshop</i> / sosialisasi	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.c Terlaksananya <i>monitoring luring</i> (peninjauan lapangan) implementasi BIM secara sampel pada proyek PSN berdasarkan hasil <i>monitoring</i> daring, masing-masing 1 proyek dari dari Ditjen. Sumber Daya Air dan Ditjen. Bina Marga	Laporan kegiatan <i>monitoring</i>	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
				-	-	-	1.d Terlaksananya <i>monitoring daring/online</i> implementasi BIM pada seluruh proyek PSN TA.2022-2023 dengan kriteria progres pekerjaan di atas 50% (Tahap I)	Laporan kegiatan <i>monitoring</i>	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	-	-	-

E. STRATEGI 5: PENINGKATAN TATA KELOLA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B12 (Desember 2022)			B15 (Maret 2023)			B18 (Juni 2023)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
			2 Ketersediaan ekosistem (hardware / software / lisensi/ jaringan internet, SDM) pendukung penerapan teknologi Building Information Modeling (BIM) di Kementerian PUPR	2.a Tersusunnya draf Keputusan Menteri PUPR tentang Pembentukan Tim BIM PUPR	Draft konsep Keputusan Menteri PUPR tentang Pembentukan Tim BIM PUPR	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Direktorat Prasarana Strategis/Direktorat Sistem dan Strategi 3. Direktorat Bina Teknik Unit Organisasi Teknis	2.a Ditetapkannya Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim BIM PUPR (lintas unor)	SK Tim BIM PUPR	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2.a Terlaksananya Rapat persiapan integrasi platform <i>Common Data Environment</i> (CDE) eksisting yang ada di unor dengan CDE di Pusdatin	Notulensi, surat undangan dan daftar hadir.	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal
				2.b Terlaksananya perencanaan identifikasi dan pendataan platform <i>Common Data Environment</i> (CDE) eksisting di PUPR	Laporan perencanaan identifikasi dan pendataan platform CDE	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	2.b Terlaksananya Rapat persiapan integrasi platform <i>Common Data Environment</i> (CDE) eksisting yang ada di unor dengan CDE di Pusdatin	Notulensi, surat undangan dan daftar hadir.	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	2.b Terlaksananya perencanaan penyusunan standar perangkat pendukung implementasi teknologi BIM di Kementerian PUPR	Dokumen perencanaan penyusunan standar perangkat pendukung implementasi teknologi BIM di Kementerian PUPR	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal
				-	-	-	2.c Terlaksananya Identifikasi kebutuhan <i>hardware / software</i> BIM untuk kebutuhan pengadaan di Ditjen SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan	Laporan hasil kebutuhan <i>hardware / software</i> BIM untuk kebutuhan pengadaan	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	2.c Terlaksananya Identifikasi kebutuhan <i>hardware / software</i> BIM untuk kebutuhan pengadaan di Ditjen SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan	Laporan hasil kebutuhan <i>hardware / software</i> BIM untuk kebutuhan pengadaan	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal

E. STRATEGI 5: PENINGKATAN TATA KELOLA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B12 (Desember 2022)			B15 (Maret 2023)			B18 (Juni 2023)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
		2 Peningkatan penggunaan penggunaan produk dalam negeri (TKDN)	1 Digunakannya Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai ambang batas (Threshold) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan oleh pimpinan dapat dipenuhi oleh PPK dan Penyedia Jasa	1.a Tersusunnya konsep Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (<i>threshold</i>) TKDN pekerjaan Konstruksi	Draf konsep Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (<i>threshold</i>) TKDN pekerjaan Konstruksi	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	1.a Ditetapkannya Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (<i>threshold</i>) TKDN pekerjaan Konstruksi	Dokumen Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (<i>threshold</i>) TKDN pekerjaan Konstruksi	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	1.a Terlaksananya Sosialisasi Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (<i>threshold</i>) TKDN pekerjaan konstruksi	Laporan kegiatan sosialisasi	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR
				1.b Tersampainya usulan konsep Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dari Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi kepada Dirjen Bina Konstruksi	Nota dinas penyampaian Konsep Peraturan Menteri PUPR tentang P3DN	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	1.b Terlaksananya FGD pembahasan konsep Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan kegiatan FGD pembahasan konsep Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	1.b Harmonisasi Konsep Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan Kemenkumham	Laporan kegiatan harmonisasi	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR
			2 Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah tertib mendapatkan persetujuan pimpinan	2.a Tersusunnya draf Pedoman <i>Monev</i> dan Pelaporan Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing	Draf Pedoman <i>Monev</i> dan Pelaporan Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	2.a Ditetapkannya Pedoman <i>Monev</i> dan Pelaporan Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing	Buku Pedoman <i>Monev</i> dan Pelaporan	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	2.a Terlaksananya sosialisasi Surat Menteri PUPR terkait Mekanisme Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing	Laporan kegiatan sosialisasi	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR
				-	-	-	2.b Terlaksananya <i>workshop</i> dan sosialisasi Pedoman <i>Monev</i> dan Pelaporan Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing	Laporan kegiatan <i>workshop</i> / sosialisasi	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	-	-	-

E. STRATEGI 5: PENINGKATAN TATA KELOLA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B21 (September 2023)			B24 (Desember 2023)			B27 (Maret 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
5	Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	1 Meningkatkan tata kelola pekerjaan konstruksi berbasis digital	1 Peningkatan kualitas dan kuantitas penerapan teknologi <i>Building Information Modeling (BIM)</i> pada proyek konstruksi sejak tahap perencanaan sampai tahap operasi dan pemeliharaan	1.a Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dengan target 100 ASN (Tahap 3)	Laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.a Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dengan target 100 ASN (Tahap 4)	Laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.a Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dengan target 100 ASN (Tahap 5)	Laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.b Terlaksananya <i>monitoring</i> daring/ <i>online</i> implementasi BIM pada seluruh proyek PSN TA.2022-2023 dengan kriteria progress pekerjaan di atas 50% (Tahap III)	Laporan kegiatan <i>monitoring</i>	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.b Terlaksananya evaluasi akhir hasil pelaksanaan <i>monitoring</i> penerapan teknologi BIM pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2022-2023, baik <i>monitoring</i> secara daring/ <i>online</i> maupun <i>luring/offline</i>	Laporan hasil evaluasi akhir	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.b Terlaksananya <i>monitoring</i> daring/ <i>online</i> implementasi BIM pada seluruh proyek PSN TA.2023-2024 dengan kriteria progres pekerjaan di atas 50% (Tahap I)	Laporan kegiatan <i>monitoring</i>	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
				1.c Terlaksananya <i>monitoring</i> luring (peninjauan lapangan) implementasi BIM secara sampel pada proyek PSN berdasarkan hasil <i>monitoring</i> daring, masing-masing 1 proyek dari dari Ditjen. Cipta Karya dan Ditjen. Perumahan	Laporan kegiatan <i>monitoring</i>	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

E. STRATEGI 5: PENINGKATAN TATA KELOLA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B21 (September 2023)			B24 (Desember 2023)			B27 (Maret 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
			2 Ketersediaan ekosistem (hardware / software / lisensi/ jaringan internet, SDM) pendukung penerapan teknologi Building Information Modeling (BIM) di Kementerian PUPR	2.a Tersusunnya draf integrasi platform <i>Common Data Environment</i> (CDE) eksisting yang ada di Unor dengan CDE di Pusdatin	Draf awal konsep kebijakan integrasi platform CDE PUPR	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	2.a Terlaksananya <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) pembahasan draf integrasi platform <i>Common Data Environment</i> (CDE) eksisting yang ada di unor dengan CDE di Pusdatin	Draf kebijakan integrasi hasil FGD	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	2.a Ditetapkannya integrasi platform <i>Common Data Environment</i> (CDE) eksisting yang ada di Unor dengan CDE di Pusdatin	Dokumen kebijakan integrasi platform CDE di PUPR	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal
				2.b Ditetapkannya standar perangkat pendukung implementasi teknologi BIM di Kementerian PUPR	Dokumen Standar Perangkat Pendukung Implementasi BIM di PUPR	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	2.b Terlaksananya sosialisasi standar perangkat pendukung implementasi teknologi BIM di Kementerian PUPR	Laporan hasil sosialisasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	2.b Terlaksananya <i>monitoring</i> pengadaan perangkat pendukung implementasi teknologi BIM pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)	Laporan hasil <i>monitoring</i>	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal
				2.c Terlaksananya <i>monitoring</i> pengadaan perangkat pendukung implementasi teknologi BIM pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga	Laporan hasil <i>monitoring</i>	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	2.c Terlaksananya <i>monitoring</i> pengadaan perangkat pendukung implementasi teknologi BIM pada Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan	Laporan hasil <i>monitoring</i>	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	2.c Terlaksananya evaluasi pengadaan perangkat pendukung implementasi teknologi BIM pada Direktorat Jenderal SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, Bina Konstruksi dan BPSDM Periode TA 2023	Laporan hasil kegiatan evaluasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal
		2 Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (TKDN)	1 Digunakannya Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai ambang batas (Threshold) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan oleh pimpinan dapat dipenuhi oleh PPK dan Penyedia Jasa	1.a Terlaksananya monev dan pelaporan implementasi Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (<i>threshold</i>) TKDN pekerjaan konstruksi pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2023	Laporan kegiatan <i>monev</i>	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	1.a Terlaksananya evaluasi akhir dan pelaporan implementasi Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (<i>threshold</i>) TKDN pekerjaan konstruksi pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2023	Laporan evaluasi akhir	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	1.a Terlaksananya monev dan pelaporan implementasi Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (<i>threshold</i>) TKDN pekerjaan konstruksi pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2024	Laporan kegiatan <i>monev</i>	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR
				1.b Pengesahan Konsep Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Konsep Peraturan Menteri PUPR yang sudah disahkan	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	1.b Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Laporan kegiatan sosialisasi	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	1.b Terlaksananya <i>monev</i> dan pelaporan terkait penerapan Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2024	Laporan kegiatan <i>monev</i>	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR

E. STRATEGI 5: PENINGKATAN TATA KELOLA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B21 (September 2023)			B24 (Desember 2023)			B27 (Maret 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
			2 Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah tertib mendapatkan persetujuan pimpinan	2.a Terlaksananya monev dan pelaporan terkait implementasi Surat Menteri PUPR terkait Mekanisme Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2023	Laporan kegiatan monev	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	2.a Terlaksananya evaluasi akhir dan pelaporan realisasi penggunaan barang impor dan Tenaga Kerja Asing pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2023	Laporan evaluasi akhir	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	2.a Terlaksananya monev dan pelaporan terkait implementasi Surat Menteri PUPR terkait Mekanisme Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2024	Laporan kegiatan monev	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B30 (Juni 2024)			B33 (September 2024)			B36 (Desember 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
5	Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	1 Meningkatkan tata kelola pekerjaan konstruksi berbasis digital	1 Peningkatan kualitas dan kuantitas penerapan teknologi Building Information Modeling (BIM) pada proyek konstruksi sejak tahap perencanaan sampai tahap operasi dan pemeliharaan	1.a Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dengan target 100 ASN (Tahap 6)	Laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.a Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dengan target 100 ASN (Tahap 7)	Laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.a Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dengan target 100 ASN (Tahap 8)	Laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1.b Terlaksananya <i>monitoring</i> daring/ <i>online</i> implementasi BIM pada pada seluruh proyek PSN TA.2023-2024 dengan kriteria progres pekerjaan di atas 50% (Tahap II)	Laporan kegiatan <i>monitoring</i>	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.b Terlaksananya <i>monitoring</i> daring/ <i>online</i> implementasi BIM pada pada seluruh proyek PSN mulai TA.2023 dengan kriteria progres pekerjaan di atas 50% (Tahap III)	Laporan kegiatan <i>monitoring</i>	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.b Terlaksananya evaluasi akhir hasil pelaksanaan <i>monitoring</i> implementasi teknologi BIM pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2024, baik yang dilakukan secara daring/ <i>online</i> maupun luring/ <i>offline</i>	Laporan hasil evaluasi	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

E. STRATEGI 5: PENINGKATAN TATA KELOLA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B30 (Juni 2024)			B33 (September 2024)			B36 (Desember 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
				1.c Terlaksananya <i>monitoring</i> luring (peninjauan lapangan) implementasi BIM secara sampel pada proyek PSN berdasarkan hasil <i>monitoring</i> daring, masing-masing 1 proyek dari dari Ditjen. Sumber Daya Air dan Ditjen. Bina Marga	Laporan kegiatan <i>monitoring</i>	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.c Terlaksananya <i>monitoring</i> luring (peninjauan lapangan) implementasi BIM secara sampel pada proyek PSN berdasarkan hasil <i>monitoring</i> daring, masing-masing 1 proyek dari dari Ditjen. Cipta Karya dan Ditjen. Perumahan	Laporan kegiatan <i>monitoring</i>	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.c Finalisasi dan penetapan draf kebijakan terkait <i>library</i> komponen BIM	Dokumen kebijakan terkait <i>library</i> komponen BIM	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
				1.d Terlaksanakannya <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) <i>brainstorming</i> konsep draf kebijakan terkait ketentuan <i>library</i> komponen BIM	Laporan kegiatan FGD	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.d Terlaksananya <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) pembahasan lanjutan konsep draf kebijakan terkait ketentuan <i>library</i> komponen BIM	Laporan kegiatan FGD	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	-	-	-
			2 Ketersediaan ekosistem (hardware / software / lisensi/ jaringan internet, SDM) pendukung penerapan teknologi Building Information Modeling (BIM) di Kementerian PUPR	2.a Terlaksananya sosialisasi integrasi platform <i>Common Data Environment</i> (CDE) eksisting yang ada di unor dengan CDE di Pusdatin	Laporan kegiatan sosialisasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	2.a Terlaksananya monitoring integrasi platform <i>Common Data Environment</i> (CDE) eksisting yang ada di unor dengan CDE di Pusdatin	Laporan hasil monitoring	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	2.a Terlaksananya evaluasi integrasi dan penggunaan platform <i>Common Data Environment</i> (CDE) pada implementasi BIM di Kementerian PUPR	Laporan hasil kegiatan evaluasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal
				2.b Terlaksananya monitoring pengadaan perangkat pendukung implementasi teknologi BIM pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga	Laporan hasil monitoring	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	2.b Terlaksananya monitoring pengadaan perangkat pendukung implementasi teknologi BIM pada Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan	Laporan hasil monitoring	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	2.b Terlaksananya monitoring pengadaan perangkat pendukung implementasi teknologi BIM pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)	Laporan hasil monitoring	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal
				-	-	-	-	-	-	-	2.c Terlaksananya evaluasi pengadaan perangkat pendukung implementasi teknologi BIM pada Direktorat Jenderal SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, Bina Konstruksi dan BPSDM Periode TA 2024	Laporan hasil kegiatan evaluasi

E. STRATEGI 5: PENINGKATAN TATA KELOLA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B30 (Juni 2024)			B33 (September 2024)			B36 (Desember 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
		2 Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (TKDN)	1 Digunakannya Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai ambang batas (Threshold) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan oleh pimpinan dapat dipenuhi oleh PPK dan Penyedia Jasa	1.a Terlaksananya movev dan pelaporan implementasi Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (threshold) TKDN pekerjaan konstruksi pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2024	Laporan kegiatan movev	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	1.a Terlaksananya movev dan pelaporan implementasi Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (threshold) TKDN pekerjaan konstruksi pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2024	Laporan kegiatan movev	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	1.a Terlaksananya evaluasi akhir dan pelaporan implementasi Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (threshold) TKDN pekerjaan konstruksi pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2024	Laporan evaluasi akhir	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR
				1.b Terlaksananya movev dan pelaporan terkait penerapan Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2024	Laporan kegiatan movev	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	1.b Terlaksananya movev dan pelaporan terkait penerapan Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2024	Laporan kegiatan movev	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	1.b Terlaksananya evaluasi akhir dan pelaporan terkait penerapan Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2024	Laporan evaluasi akhir	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR
				2.a Terlaksananya movev dan pelaporan terkait implementasi Surat Menteri PUPR terkait Mekanisme Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2024	Laporan kegiatan movev	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	2.a Terlaksananya movev dan pelaporan terkait implementasi Surat Menteri PUPR terkait Mekanisme Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2024	Laporan kegiatan movev	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR	2.a Terlaksananya evaluasi akhir dan pelaporan terkait implementasi Surat Menteri PUPR terkait Mekanisme Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2024	Laporan evaluasi akhir	1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

F. STRATEGI 6: IMPLEMENTASI BUDAYA SADAR RISIKO

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B21 (September 2023)			B24 (Desember 2023)			B27 (Maret 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
6	Implementasi Budaya Sadar Risiko	1 Meningkatkan budaya sadar risiko dan penerapan manajemen risiko secara komprehensif	1 Termutakhirnya pedoman penerapan MR	1.a Terlaksananya FGD Penyusunan Draft Revisi SE Menteri PUPR tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR (Tahap 2)	Laporan Pelaksanaan FGD Penyusunan Draft Revisi SE Menteri PUPR tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR (Tahap 2)	1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.a Ditetapkannya Revisi SE Menteri PUPR tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR	Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR terbaru	1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal 3. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.a -	-	-
				1.b Terlaksananya penyampaian surat permohonan legal drafting Revisi SE Menteri PUPR tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR ke Biro Hukum	Surat permohonan legal drafting Revisi SE Menteri PUPR tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR	1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal 3. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.b. Terlaksananya Penyiapan bahan sosialisasi Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR terbaru	Bahan sosialisasi peraturan	1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.b Terlaksananya sosialisasi MR	Laporan sosialisasi MR	1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal
				-	-	-	1.c Terlaksananya Penyiapan implementasi MR pada Balai/Unker berdasarkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR terbaru	Laporan Penyiapan implementasi MR pada Balai/Unker berdasarkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR terbaru	1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.c Terlaksananya Implementasi MR pada 20% Balai/Unker	Laporan Implementasi MR pada 20% Balai/Unker	1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 3. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi
				Terselenggaranya <i>Executive Workshop</i> MR dan <i>Workshop</i> MR Gelombang 1	Laporan pelaksanaan <i>Executive Workshop</i> MR dan <i>Executive Workshop</i> MR dan <i>Workshop</i> MR Gelombang 1	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terselenggaranya <i>Workshop</i> MR Gelombang 2	Laporan pelaksanaan <i>Workshop</i> MR Gelombang 2	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terselenggaranya <i>Workshop</i> MR Gelombang 3	Laporan pelaksanaan <i>Workshop</i> MR Gelombang 3	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			2 Peningkatan Kompetensi MR bagi seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi dan 1000 pegawai pelaksana proporsional pada tiap Unor, dengan rincian: 1. DJBM, DJSDA, DJCK, 200 orang 2. DJJP, 150 orang 3. DJBK 100 orang 4. Itjen 50 orang 5. Setjen, BPIW, BPSDM, PI 25 orang									

F. STRATEGI 6: IMPLEMENTASI BUDAYA SADAR RISIKO

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B21 (September 2023)			B24 (Desember 2023)			B27 (Maret 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
			3 Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Risiko Kementerian PUPR	Terlaksananya <i>Piloting</i> Sistem MR (minimal UPR T-1)	Laporan pelaksanaan <i>Piloting</i> Sistem MR (minimal UPR T-1)	1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Tersedianya Sistem MR	<i>Screenshot</i> / tangkapan layar Sistem MR	1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Terlaksananya <i>Soft Launching</i> dan Sosialisasi Sistem MR pada seluruh Unit Organisasi/Unker/UPT/Balai	Laporan pelaksanaan <i>Soft Launching</i> dan Sosialisasi Sistem MR pada seluruh Unit Organisasi/Unker/UPT/Balai	1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal
			4 Tercapainya nilai evaluasi efektivitas penerapan MR Kementerian PUPR sebesar 75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.b	Terselenggaranya Pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Penerapan MR atas Penerapan MR Tahun 2022 pada tingkat UPR-Kementerian, T1, T2, dan T3	Laporan Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR atas Penerapan MR Tahun 2022	1. Sekretariat Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	4.b Penyampaian Ikhtisar Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR atas Penerapan MR Tahun 2022 (Target rata-rata nilai di Kementerian 60%)	Surat/Ikhtisar Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR atas Penerapan MR Tahun 2022 dari Irjen kepada Menteri PUPR	1. Sekretariat Inspektorat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	4.b Terselenggaranya Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Penerapan MR atas Penerapan MR Tahun 2023 pada tingkat UPR-Kementerian, T1, T2, dan T3	Surat Irjen Hal Pelaksanaan Evaluasi Efektivitas MR	Sekretariat Inspektorat Jenderal
			4.c	Terlaksananya FGD Penyusunan SE Menteri PUPR Tentang Pedoman Evaluasi Efektivitas Penerapan MR	Laporan FGD	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	4.c Ditetapkannya SE Menteri PUPR Tentang Pedoman Evaluasi Efektivitas Penerapan MR	Salinan SE Menteri PUPR Tentang Pedoman Evaluasi Efektivitas Penerapan MR	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	-	-	-

F. STRATEGI 6: IMPLEMENTASI BUDAYA SADAR RISIKO

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B30 (Juni 2024)			B33 (September 2024)			B36 (Desember 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
6	Implementasi Budaya Sadar Risiko	1 Meningkatkan budaya sadar risiko dan penerapan manajemen risiko secara komprehensif	1 Termutakhirnya pedoman penerapan MR	1.a -	-	-	1.a -	-	-	1.a -	-	-
				1.b Terlaksananya sosialisasi MR	Laporan sosialisasi MR	1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.b Terlaksananya sosialisasi MR	Laporan sosialisasi MR	1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1.b -	-	-
				1.c Terlaksananya Implementasi MR pada 50% Balai/Unker	Laporan Implementasi MR pada 50% Balai/Unker	1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 3. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	1.c Terlaksananya Implementasi MR pada 60% Balai/Unker	Laporan Implementasi MR pada 60% Balai/Unker	1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 3. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	1.c -	-	-
			2 Peningkatan Kompetensi MR bagi seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi dan 1000 pegawai pelaksana proporsional pada tiap Unor, dengan rincian: 1. DJBM, DJSDA, DJCK, 200 orang 2. DJP, 150 orang 3. DJBK 100 orang 4. Itjen 50 orang 5. Setjen, BPIW, BPSDM, PI 25 orang	Terlaksananya Penyiapan modul <i>e-learning</i> sesuai peraturan pengganti SE Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2021 Tahun 2021	Laporan Penyiapan modul <i>e-learning</i> sesuai peraturan pengganti SE Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2021 Tahun 2021	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terselenggaranya <i>Executive Workshop</i> MR secara daring (<i>e-learning</i>)	Laporan pelaksanaan <i>Executive Workshop</i> MR secara daring (<i>e-learning</i>)	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya Rapat koordinasi integrasi modul pelatihan MR dan e-katalog pengembangan kompetensi	Laporan pelaksanaan Rapat koordinasi integrasi modul pelatihan MR dan e-katalog pengembangan kompetensi	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			3 Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Risiko Kementerian PUPR	Digunakannya Sistem MR oleh UNOR	Laporan penggunaan Sistem MR oleh UNOR	1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 3. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	-	-	-	Terlaksananya Evaluasi atas penggunaan Sistem MR	Laporan Evaluasi atas penggunaan Sistem MR	1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 3. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal
			4 Tercapainya nilai evaluasi efektivitas penerapan MR Kementerian PUPR sebesar 75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.b Terselenggaranya Pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Penerapan MR atas Penerapan MR Tahun 2023 pada tingkat UPR-Kementerian, T1, T2, dan T3	Surat Ijzen Hal Pelaksanaan Evaluasi Efektivitas MR	Sekretariat Inspektorat Jenderal	4.b Penyampaian Ikhtisar Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR atas Penerapan MR Tahun 2023 (Target rata-rata nilai di Kementerian 75%)	Surat/Ikhtisar Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR atas Penerapan MR Tahun 2023 dari Irjen kepada Menteri PUPR	Sekretariat Inspektorat Jenderal	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

G. STRATEGI 7: PENGUATAN UNIT KEPATUHAN INTERN (UKI)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B12 (Desember 2022)			B15 (Maret 2023)			B18 (Juni 2023)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
7	Penguatan Unit Kepatuhan Intern (UKI)	1 Melaksanakan manajemen kepatuhan intern	1 Terbangunnya manajemen kepatuhan intern	1.a Tersusunnya kajian atas evaluasi kelembagaan UKI	Dokumen Kajian Evaluasi Kelembagaan UKI	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	1.a Tersusunnya draf usulan penyempurnaan mekanisme kerja KI.	Dokumen Draf Usulan Penyempurnaan Mekanisme Kerja KI	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	1.a Terlaksananya FGD Lanjutan atas draf usulan penyempurnaan mekanisme kerja KI	1. Laporan Hasil FGD 2. Draf usulan penyempurnaan mekanisme kerja UKI	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal
				1.b Tersusunnya draf SK Tim Penyusun SE Menteri tentang Mekanisme Kerja KI	Draf SK Tim Penyusun SE Menteri tentang Mekanisme Kerja KI	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	1.b Ditetapkan SK Tim Penyusun SE Menteri tentang Mekanisme Kerja KI	SK Tim Penyusun SE Menteri tentang Mekanisme Kerja KI	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	1.b Tersusunnya surat permintaan <i>Legal drafting</i> ke Biro Hukum	Surat permintaan <i>legal drafting</i> ke Biro Hukum	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal
				2.a Terbentuknya Tim Reviu atas draf standar kompetensi KI (kamus kompetensi terkait pengendalian intern)	SK Tim reviu	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.a Terlaksananya FGD reviu draf standar kompetensi KI (kamus kompetensi terkait pengendalian intern)	Laporan Hasil FGD dan Draf kamus kompetensi terkait pengendalian intern	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.a Ditetapkannya Kamus Kompetensi terkait pengendalian intern	Kamus Kompetensi terkait pengendalian intern	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			2.b Terlaksananya penyiapan kebutuhan akan diklat (KAD) peningkatan kompetensi KI	Hasil Identifikasi KAD	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.b Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi KI	Laporan pelaksanaan kegiatan	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.b Terlaksananya persiapan penyusunan modul peningkatan kompetensi KI	Laporan pelaksanaan persiapan penyusunan modul peningkatan kompetensi KI	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

G. STRATEGI 7: PENGUATAN UNIT KEPATUHAN INTERN (UKI)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B21 (September 2023)			B24 (Desember 2023)			B27 (Maret 2024)			
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	
7	Penguatan Unit Kepatuhan Intern (UKI)	1 Melaksanakan manajemen kepatuhan intern	1 Terbangunnya manajemen kepatuhan intern	1.a Ditetapkannya SE Menteri PUPR tentang Mekanisme Kerja KI	SE Menteri PUPR tentang Mekanisme Kerja KI	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	1.a -	-	-	1.a -	-	-	
				1.b Terlaksananya internalisasi SE Mekanisme Kerja KI (Tahap 1)	Laporan pelaksanaan internalisasi SE Mekanisme Kerja KI	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	1.b Terlaksananya internalisasi SE Mekanisme Kerja KI (Tahap 2)	Laporan pelaksanaan internalisasi SE Mekanisme Kerja KI	1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	1.b Terlaksananya internalisasi SE Mekanisme Kerja KI kepada UKI UPT (Tahap 1)	Laporan Internalisasi SE Mekanisme Kerja KI kepada UKI UPT	Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	
			2 Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM UKI sebanyak 200 peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.b Terlaksananya penyusunan modul kompetensi KI	Draf modul kompetensi KI	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.b.1 Ditetapkannya modul peningkatan kompetensi KI	Modul peningkatan kompetensi KI	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.b Terlaksananya peningkatan kompetensi KI di TA 2023 (Batch 1)	Laporan pelaksanaan workshop	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.b Terlaksananya peningkatan kompetensi KI di TA 2024 (Batch 2)
7	Penguatan Unit Kepatuhan Intern (UKI)	1 Melaksanakan manajemen kepatuhan intern	1 Terbangunnya manajemen kepatuhan intern	1.a -	-	-	1.a -	-	-	1.a -	-	-	
				1.b Terlaksananya internalisasi SE Mekanisme Kerja KI kepada UKI UPT (Tahap 2)	Laporan Internalisasi SE Mekanisme Kerja KI kepada UKI UPT	Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	1.b Terlaksananya implementasi mekanisme kerja KI pada UKI. <i>Catatan: menggunakan Daftar SIMAK yang disusun oleh Itien</i>	Laporan Implementasi Mekanisme Kerja KI kepada UKI	Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	1.b Terlaksananya evaluasi hasil implementasi mekanisme kerja KI	Laporan Evaluasi hasil implementasi mekanisme kerja KI	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	
7	Penguatan Unit Kepatuhan Intern (UKI)	1 Melaksanakan manajemen kepatuhan intern	2 Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM UKI sebanyak 200 peserta	2.b -	-	-	2.b.1 -	-	-	2.b -	-	-	
				Terlaksananya peningkatan kompetensi KI di TA 2024 (Batch 3)	Laporan pelaksanaan workshop	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.b.2 Terlaksananya peningkatan kompetensi KI di TA 2024 (Batch 4)	Laporan pelaksanaan workshop	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.b Terlaksananya evaluasi pelaksanaan workshop peningkatan kompetensi KI	1. Laporan evaluasi 2. Rekomendasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan UKI Unit Organisasi	
7	Penguatan Unit Kepatuhan Intern (UKI)	1 Melaksanakan manajemen kepatuhan intern	1 Terbangunnya manajemen kepatuhan intern	1.a -	-	-	1.a -	-	-	1.a -	-	-	
				1.b Terlaksananya internalisasi SE Mekanisme Kerja KI kepada UKI UPT (Tahap 2)	Laporan Internalisasi SE Mekanisme Kerja KI kepada UKI UPT	Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	1.b Terlaksananya implementasi mekanisme kerja KI pada UKI. <i>Catatan: menggunakan Daftar SIMAK yang disusun oleh Itien</i>	Laporan Implementasi Mekanisme Kerja KI kepada UKI	Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi	1.b Terlaksananya evaluasi hasil implementasi mekanisme kerja KI	Laporan Evaluasi hasil implementasi mekanisme kerja KI	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	
7	Penguatan Unit Kepatuhan Intern (UKI)	1 Melaksanakan manajemen kepatuhan intern	2 Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM UKI sebanyak 200 peserta	2.b -	-	-	2.b.1 -	-	-	2.b -	-	-	
				Terlaksananya peningkatan kompetensi KI di TA 2024 (Batch 3)	Laporan pelaksanaan workshop	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.b.2 Terlaksananya peningkatan kompetensi KI di TA 2024 (Batch 4)	Laporan pelaksanaan workshop	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.b Terlaksananya evaluasi pelaksanaan workshop peningkatan kompetensi KI	1. Laporan evaluasi 2. Rekomendasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan UKI Unit Organisasi	

H. STRATEGI 8: EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

NO.	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B12 (Desember 2022)			B15 (Maret 2023)			B18 (Juni 2023)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
8	Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	1 Pengamanan BMN berupa Tanah di Kementerian PUPR secara optimal	1 Terlaksananya percepatan proses sertifikasi aset tetap Tanah di Kementerian PUPR	1.a Tersusunnya rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tentang Penanggungjawab dan Tim Pelaksana Pengamanan dan Sertifikasi Aset Tetap Tanah di Kementerian PUPR.	Dokumen rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tentang Penanggungjawab dan Tim Pelaksana Pengamanan dan Sertifikasi Aset Tetap Tanah di Kementerian PUPR.	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	1.a Tersedianya Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tentang Penanggungjawab dan Tim Pelaksana Pengamanan Sertifikasi Aset Tanah.	Dokumen Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tentang Penanggungjawab dan Tim Pelaksana Pengamanan Sertifikasi Aset Tanah	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sekretariat Unit Organisasi	1.a Terlaksananya FGD Pemetaan Targeting Sertifikasi Aset Tetap Tanah sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Identifikasi Status Sertifikasi Aset Tetap Tanah	Laporan Kegiatan Pelaksanaan FGD dan notulensi hasil pembahasan/ kesepakatan.	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sekretariat Unit Organisasi
				1.b Tersusunnya rancangan Surat Keputusan Menteri PUPR tentang Tim Percepatan Hibah BMN di Kementerian PUPR yang terdiri dari perwakilan dari tiap Unit Organisasi yang memiliki BMN yang akan dihibahkan.	Dokumen rancangan Surat Keputusan Menteri PUPR tentang Tim Percepatan Hibah BMN di Kementerian PUPR	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	1.a Ditetapkannya Surat Keputusan Menteri PUPR tentang Tim Percepatan Hibah BMN di Kementerian PUPR yang berisikan perwakilan dari tiap Unit Organisasi yang memiliki BMN yang akan dihibahkan	Dokumen Surat Keputusan Menteri PUPR tentang Tim Percepatan Hibah BMN di Kementerian PUPR	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	1.a Tersusunnya rancangan Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017	Dokumen rancangan Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal
		2 Pemindahtanganan BMN melalui hibah secara tertib dan tepat waktu	1 Terlaksananya percepatan penyelesaian proses Hibah BMN dengan tertib dan tepat waktu	1.a Tersusunnya rancangan Surat Keputusan Menteri PUPR tentang Tim Percepatan Hibah BMN di Kementerian PUPR yang terdiri dari perwakilan dari tiap Unit Organisasi yang memiliki BMN yang akan dihibahkan.	Dokumen rancangan Surat Keputusan Menteri PUPR tentang Tim Percepatan Hibah BMN di Kementerian PUPR	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	1.a Ditetapkannya Surat Keputusan Menteri PUPR tentang Tim Percepatan Hibah BMN di Kementerian PUPR yang berisikan perwakilan dari tiap Unit Organisasi yang memiliki BMN yang akan dihibahkan	Dokumen Surat Keputusan Menteri PUPR tentang Tim Percepatan Hibah BMN di Kementerian PUPR	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	1.a Tersusunnya rancangan Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017	Dokumen rancangan Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal
				1.b Penyampaian Surat Sekretaris Jenderal kepada Unit Organisasi untuk menetapkan target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk tahun 2023	Surat Sekretaris Jenderal kepada Unit Organisasi untuk menetapkan target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk tahun 2023	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	1.b Penyampaian Surat Unit Organisasi (ABCP) atas target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk tahun 2023: 1. BMN perolehan 2017-2022 2. BMN perolehan 2017-kebawah	Surat Penyampaian masing-masing Unit Organisasi (ABCP) atas target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk tahun 2023	Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan	1.b Terlaksananya FGD pembahasan rencana penyelesaian penyerahan BMN kepada pihak ketiga sesuai usulan dari Unit Organisasi: 1. BMN perolehan 2017-2022: a. Target penyelesaian yang diusulkan b. Kendala-kendala dan penyelesaiannya 2. BMN perolehan 2017-kebawah a. Permasalahan untuk setiap tahun perolehan b. Kendala-kendala dan langkah penyelesaiannya	Laporan Kegiatan Pelaksanaan FGD dan notulensi hasil pembahasan/ kesepakatan.	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal

H. STRATEGI 8: EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

NO.	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B21 (September 2023)			B24 (Desember 2023)			B27 (Maret 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
8	Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	1 Pengamanan BMN berupa Tanah di Kementerian PUPR secara optimal	1 Terlaksananya percepatan proses sertifikasi aset tetap Tanah di Kementerian PUPR	1.a Tersusunnya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang penetapan target pelaksanaan sertifikasi tanah.	Dokumen Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang penetapan target pelaksanaan sertifikasi tanah.	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sekretariat Unit Organisasi	1.a Terlaksananya <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap pencapaian target dan kendala dalam pelaksanaan proses sertifikasi tanah	Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi .	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sekretariat Unit Organisasi	1.a Terlaksananya <i>monitoring</i> dan evaluasi lanjutan tahap pertama terhadap progres pencapaian target dan kendala dalam pelaksanaan sertifikasi tanah	Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sekretariat Unit Organisasi
		2 Pemindahtanganan BMN melalui hibah secara tertib dan tepat waktu	1 Terlaksananya percepatan penyelesaian proses Hibah BMN dengan tertib dan tepat waktu	1.a Terlaksananya FGD pembahasan rancangan Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017	Laporan kegiatan pelaksanaan FGD pembahasan rancangan Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	1.a Finalisasi dan tersampainya Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017 kepada Biro Hukum untuk proses legalisasi	Rancangan final Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	1.a Ditetapkannya Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017	Dokumen Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal
				1.b Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas pelaksanaan proses penyerahan barang kepada pihak ketiga dari masing-masing Unit Organisasi (ABCP) sesuai dengan target yang ditetapkan oleh surat pimpinan Unit Organisasi (ABCP) seperti disebut dalam B15	Laporan hasil pelaksanaan <i>monev</i>	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan	1.b - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan proses penyerahan barang kepada pihak ketiga dari masing-masing unit organisasi (ABCP) sesuai dengan target yang ditetapkan oleh surat pimpinan unit organisasi (ABCP) seperti disebut dalam B15 - Surat Sekretaris Jenderal kepada Unit Organisasi untuk menetapkan target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk tahun 2024	- Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi; - Surat Sekretaris Jenderal PUPR kepada Unit Organisasi tentang penetapan target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga di tahun 2024.	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan	1.b Penyampaian Surat dari Unit Organisasi tentang penetapan target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga di tahun 2024: 1. BMN perolehan 2017-2023 2. BMN perolehan 2017-kebawah	Surat dari Unit Organisasi tentang penetapan target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga di tahun 2024: 1. BMN perolehan 2017-2023 2. BMN perolehan 2017-kebawah	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan

H. STRATEGI 8: EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

NO.	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B30 (Juni 2024)			B33 (September 2024)			B36 (Desember 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
8	Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	1 Pengamanan BMN berupa Tanah di Kementerian PUPR secara optimal	1 Terlaksananya percepatan proses sertifikasi aset tetap Tanah di Kementerian PUPR	1.a Terlaksananya <i>monitoring</i> dan evaluasi lanjutan tahap kedua terhadap progres pencapaian target dan kendala dalam pelaksanaan sertifikasi tanah.	Laporan hasil pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi .	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sekretariat Unit Organisasi	1.a Terlaksananya rapat koordinasi dengan Unor dalam rangka pembahasan hasil pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi terkait pencapaian target sertifikasi tanah dan perumusan rencana tindak lanjut atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi tanah	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sekretariat Unit Organisasi	1.a Terlaksananya rapat pembahasan hasil evaluasi pencapaian target dan pembahasan penetapan tindak lanjut atas kendala dalam pelaksanaan sertifikasi tanah.	Laporan pelaksanaan rapat dan notulensi rapat	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sekretariat Unit Organisasi
		2 Pemindahtanganan BMN melalui hibah secara tertib dan tepat waktu	1 Terlaksananya percepatan penyelesaian proses Hibah BMN dengan tertib dan tepat waktu	1.a Terlaksananya sosialisasi tahap ke-I atas Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017	Laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	1.a Terlaksananya sosialisasi tahap ke-II atas Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017	Laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	1.a -	-	-
				1.b Terlaksananya FGD pembahasan rencana penyelesaian terhadap proses BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga di tahun 2024 berdasarkan masukan dari Unit Organisasi: 1. BMN perolehan 2017-2023: a. Target penyelesaian yang diusulkan b. Kendala-kendala dan penyelesaiannya 2. BMN perolehan 2017-ke bawah a. Permasalahan untuk setiap tahun perolehan b. Kendala-kendala dan langkah penyelesaiannya	Laporan pelaksanaan FGD dan notulensi hasil pembahasan/kesepakatan.	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	1.b Terlaksananya <i>movev</i> terhadap pelaksanaan proses penyerahan barang kepada pihak ketiga sesuai usulan dari Unit Organisasi pada periode B27.	Laporan hasil pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan	1.b - Terlaksananya <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses penyerahan barang kepada pihak ketiga sesuai usulan dari Unit Organisasi pada periode B27; - Tersusunnya Surat Sekretaris Jenderal PUPR kepada Unit Organisasi tentang penetapan target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga di tahun 2025.	- Laporan hasil pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi; - Surat Sekretaris Jenderal PUPR kepada Unit Organisasi tentang penetapan target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga di tahun 2025.	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan

I. STRATEGI 9: PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENERAPAN CONTINUOUS AUDIT & CONTINUOUS MONITORING (CACM)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B12 (Desember 2022)			B15 (Maret 2023)			B18 (Juni 2023)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
9	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penerapan Continuous Audit & Continuous Monitoring (CA-CM)	Pemanfaatan sistem digital automation yang dapat memberikan early warning system terhadap penyimpangan (fraud) PBJ	1 Tersedianya digital automation system yang dapat memberikan early warning terhadap penyimpangan (fraud) PBJ	1.a Terlaksananya Rapat Pemanfaatan Aplikasi CA-CM	Laporan pelaksanaan rapat	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	1.a Ditetapkannya SK Tim Penyusunan SE Menteri PUPR tentang kebijakan tata kelola CA-CM di Kementerian PUPR	SK Tim Penyusunan SE Menteri PUPR tentang kebijakan tata kelola CA-CM di Kementerian PUPR	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	1.a Terlaksananya pembahasan draft SE Menteri PUPR tentang kebijakan tata kelola CA-CM di Kementerian PUPR (termasuk standar kualitas data input sistem informasi pendukung)	Laporan pelaksanaan pembahasan	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal
				1.a Terlaksananya penyusunan draf SE Menteri PUPR tentang kebijakan tata kelola CA-CM di Kementerian PUPR (termasuk standar kualitas data input sistem informasi pendukung)	Dokumen Draf SE Menteri PUPR	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal						
				1.b Terlaksananya FGD penyusunan rencana pengembangan aplikasi CA-CM (stakeholder/ pengelola sistem informasi pendukung)	Laporan pelaksanaan FGD	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	1.b Terlaksananya monitoring dan Evaluasi pengembangan aplikasi CA-CM Tahap I (termasuk pengaturan dashboard pimpinan unor)	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	1.b Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pengembangan aplikasi CA-CM Tahap II (termasuk pengaturan dashboard pimpinan unor)	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal
			2 Terlaksananya Perencanaan Pengawasan intern berbasis risiko sesuai SE 24/2020 dengan menggunakan ketersediaan informasi aplikasi CA-CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I. STRATEGI 9: PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENERAPAN CONTINUOUS AUDIT & CONTINUOUS MONITORING (CACM)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B21 (September 2023)			B24 (Desember 2023)			B27 (Maret 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
9	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penerapan Continuous Audit & Continuous Monitoring (CA-CM)	Pemanfaatan sistem <i>digital automation</i> yang dapat memberikan <i>early warning system</i> terhadap penyimpangan (<i>fraud</i>) PBJ	1 Tersedianya <i>digital automation system</i> yang dapat memberikan <i>early warning</i> terhadap penyimpangan (<i>fraud</i>) PBJ	1.a Ditetapkannya SE Menteri PUPR tentang kebijakan tata kelola CA-CM di Kementerian PUPR (termasuk standar kualitas data <i>input</i> sistem informasi pendukung)	SE Menteri PUPR tentang kebijakan tata kelola CA-CM di Kementerian PUPR	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	1.a Terlaksananya Sosialisasi SE Menteri PUPR tentang kebijakan tata kelola CA-CM di Kementerian PUPR	Laporan pelaksanaan sosialisasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	-	-	-
				1.b Terlaksananya Uji coba aplikasi CA-CM (hasil <i>move</i> B15 dan B18)	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	1.b Terlaksananya <i>Launching</i> Aplikasi CA-CM Kementerian PUPR	Laporan pelaksanaan <i>Launching</i> Aplikasi CA-CM Kementerian PUPR	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	1.b Terlaksananya <i>monitoring</i> pemanfaatan Aplikasi CA-CM	Laporan pelaksanaan <i>monitoring</i>	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal
				1.c Terlaksananya perancangan peningkatan kompetensi SDM pendukung kegiatan CA-CM sesuai dengan SE Menteri PUPR tentang kebijakan tata Kelola CA-CM	Laporan pelaksanaan perancangan peningkatan kompetensi SDM pendukung CA-CM	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	1.c Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi SDM pendukung CA-CM	Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi SDM pendukung CACM	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	-	-	-
			2 Terlaksananya Perencanaan Pengawasan intern berbasis risiko sesuai SE 24/2020 dengan menggunakan ketersediaan informasi aplikasi CA-CM	Tersusunnya usulan PKPT pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri 24/2020 oleh 2 sampel terpilih berdasarkan informasi <i>dashboard</i> CA-CM	Nota Dinas Dokumen usulan PKPT pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri PUPR No.24/2020 oleh 2 (dua) sampel terpilih berdasarkan informasi <i>dashboard</i> CA-CM	Sekretariat Inspektorat Jenderal	2.a Ditetapkannya PKPT pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri PUPR No. 24/2020 oleh 2 (dua) sampel terpilih	SK Penetapan	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Terlaksananya PKPT pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri PUPR No. 24/2020 oleh 2 (dua) sample terpilih	Nota dinas progress pelaksanaan PKPT	Sekretariat Inspektorat Jenderal
							2.b Terlaksananya persiapan pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri PUPR No. 24/2020 oleh 2 (dua) sampel terpilih, berdasarkan PKPT	Laporan pelaksanaan persiapan	Sekretariat Inspektorat Jenderal			

I. STRATEGI 9: PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENERAPAN CONTINUOUS AUDIT & CONTINUOUS MONITORING (CACM)

No	STRATEGI	LANGKAH STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN	B30 (Juni 2024)			B33 (September 2024)			B36 (Desember 2024)		
				UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	BUKTI DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
9	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penerapan Continuous Audit & Continuous Monitoring (CA-CM)	Pemanfaatan sistem digital automation system yang dapat memberikan early warning terhadap penyimpangan (fraud) PBJ	1 Tersedianya digital automation system yang dapat memberikan early warning terhadap penyimpangan (fraud) PBJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.b Terlaksananya monitoring pemanfaatan Aplikasi CA-CM	Laporan pelaksanaan monitoring	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Tersusunnya perencanaan Evaluasi Implementasi CA-CM Tahap II (2022-2024)	Dokumen Perencanaan Evaluasi Implementasi CA-CM Tahap II (2022-2024)	1. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	Terlaksananya Evaluasi Implementasi CA-CM Tahap II (2022-2024)	Laporan pelaksanaan Evaluasi Implementasi CA-CM Tahap II (2022-2024)	1. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2 Terlaksananya Perencanaan Pengawasan intern berbasis risiko sesuai SE 24/2020 dengan menggunakan ketersediaan informasi aplikasi CA-CM	Tersusunnya draf laporan pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri PUPR No. 24/2020 oleh 2 (dua) sampel terpilih dan pembahasan dengan auditi	Draf laporan pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri PUPR No. 24/2020 oleh 2 (dua)sample terpilih dan pembahasan dengan auditi	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Tersusunnya laporan pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri PUPR No. 24/2020 oleh 2 (dua) sampel terpilih	Laporan pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri PUPR No. 24/2020 oleh 2 (dua) sampel terpilih	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri PUPR No. 24/2020	Laporan evaluasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Kepala Biro Hukum,

 Pubranta Setyanugraha, SH. MSi.
 NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO